

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara dengan ribuan pulau yang memiliki berbagai macam karakteristik wilayah di dalamnya. Perbedaan karakteristik seperti letak geografis dan kekayaan alam yang dimiliki oleh tiap daerah yang berbeda-beda ini berdampak pada perbedaan pola pembangunan ekonomi di setiap wilayah. Daerah yang memiliki sumber penerimaan yang banyak dan letak geografisnya cenderung ke pusat maka pembangunan ekonominya relatif lebih baik. Tetapi berbeda dengan daerah yang letaknya berada jauh dari pusat dan sumber penerimaannya sedikit maka pembangunan ekonominya cenderung lambat. Perbedaan-perbedaan inilah yang diindikasikan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antar wilayah.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah fenomena yang umum terjadi dalam proses membangun ekonomi. Fenomena ini tidak saja terjadi pada Negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi pada Negara maju walaupun dengan tingkat ketimpangan yang berbeda. Ketimpangan ekonomi biasanya disebabkan karena ada perbedaan *endowment factor* yaitu berupa perbedaan kandungan SDA dan kondisi demografis yang terdapat di suatu daerah, yang menyebabkan kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada suatu daerah biasanya terdapat daerah yang relatif maju (*developed region*) dan daerah yang relatif terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan ekonomi yang terjadi antar daerah ini, akan membawa pengaruh terhadap proses pembangunan suatu

daerah serta tingkat kesejahteraan pada masyarakat di daerah tersebut. Biasanya pengaruh yang timbul berbentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, aspek ketimpangan ekonomi antardaerah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (Sjafrizal, 2018).

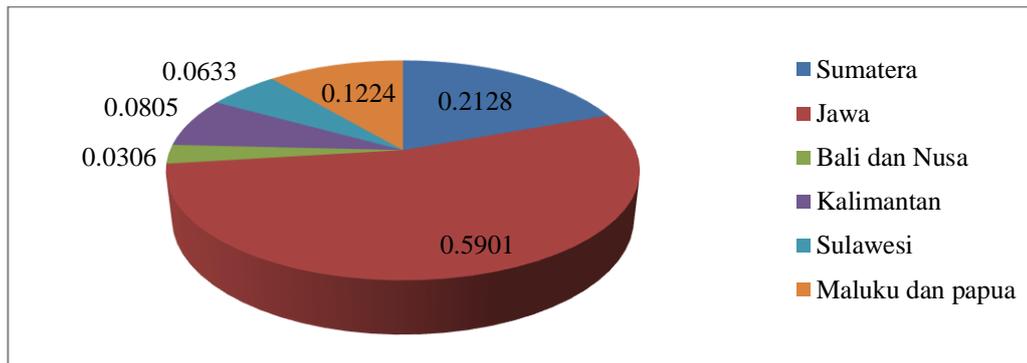
Pemerintah dalam Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, “perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang mengikuti pola berdasarkan hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang ada. Pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tuntas perlu dilakukan sehingga sasaran pembangunan menjadi optimal dan kesejahteraan umum dapat tercapai. Kesejahteraan umum artinya mewujudkan masyarakat yang adil dan tidak timpang”. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat merupakan akar dari berbagai permasalahan sosial dan dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu pengentasan ketimpangan pembangunan ini perlu menjadi fokus pemerintah.

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mencapai kehidupan suatu masyarakat menjadi lebih baik dalam peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang pokok, peningkatan standar hidup secara sosial dan ekonomis baik peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja dan pendidikan yang lebih baik (Tadoro, 2004). Adanya pemerataan pembangunan pada setiap wilayah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakatnya. Kondisi ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat maupun pemerintah adalah terjadinya pertumbuhan yang berkualitas. Maksudnya adalah terjadinya peningkatan produktivitas dan pendapatan, perbaikan kesejahteraan dan kenaikan standar hidup menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Untuk mencapai semua itu suatu Negara harus melaksanakan pemerataan pembangunan pada setiap wilayah dan meningkatkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi karena kesejahteraan suatu Negara tidak terlepas dari kontribusi PDRB suatu daerah (pertumbuhan ekonomi). Di Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Negara Indonesia menganggap bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. karenanya untuk mendongkrak laju pembangunan ekonomi diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dapat diyakini bahwa masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pembangunan dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. (susilowati, Sri, & Suliswanto, 2015).

Ketimpangan pembangunan wilayah dapat terjadi akibat adanya kegiatan pengkonsentrasian kegiatan ekonomi di suatu wilayah/daerah. Tingkat aglomerasi di suatu daerah dapat mencerminkan kemampuan dari daerah tersebut. Pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar apabila suatu daerah membebankan seluruh kebutuhannya hanya kepada pemerintah saja, diperlukan juga kemampuan daerah dalam upaya mencukupi anggaran belanja daerah sehingga dalam proses pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar (Kusuma, 2013).

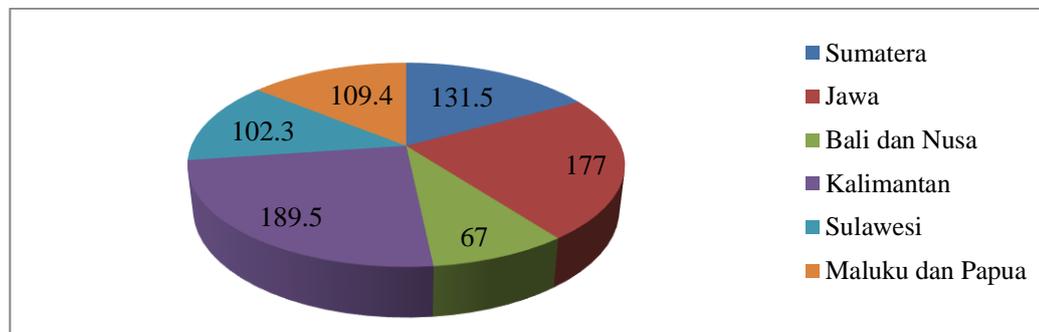


**Grafik 1.1 Tingkat Aglomerasi di Indonesia Yang Terbagi Atas Beberapa Pulau**

Jika melihat Grafik 1.1 tentang tingkat aglomerasi di Indonesia yang terbagi atas beberapa pulau diatas, dapat diketahui bahwa tingkat aglomerasi tertinggi di Indonesia terjadi di Pulau Jawa dengan tingkat aglomerasi sebesar 0,5901 terlampau jauh jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang hanya berkisar antara 0,2128 yang terdapat di pulau Sumatera hingga yang terkecil 0,0306 di pulau Bali dan Nusa. Aglomerasi industri merupakan satu dari beberapa indikator penunjang berkembangnya peranan industri manufaktur di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung tumbuh lebih cepat apabila terdapat aglomerasi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong proses pembangunan daerah dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan (syafrizal, 2018). Akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

Selain aglomerasi, produktivitas tenaga kerja pada suatu wilayah juga dapat mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Semakin kecil tingkat produktivitas tenaga kerja di suatu wilayah, berarti menurunkan tingkat

pendapatan daerah dan akan memicu ketimpangan wilayah karena daerah yang produktivitas tenaga kerjanya tinggi terjadi peningkatan kesejahteraan.

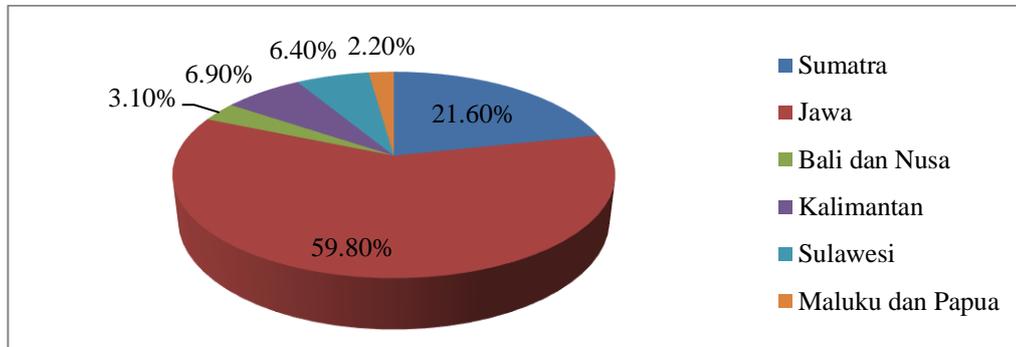


**Grafik 1.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia Yang Terbagi atas Beberapa Pulau**

Dilihat dari Grafik 1.2 tentang tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang terbagi atas beberapa pulau diatas dapat diketahui bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja yang tertinggi terdapat di pulau Kalimantan dengan tingkat produktivitas sebesar 189,5 juta rupiah per orang lebih besar dari pulau jawa yang tingkat produktivitasnya mencapai 177 juta rupiah per orang sedangkan tingkat produktivitas terendah terdapat di pulau Bali dan Nusa. Produktivitas tenaga kerja yang berbeda-beda pada setiap daerah ini dapat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan berkurang.

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,02% dengan total PDRB sebesar 15.833,9 Triliun rupiah di tahun 2019. Meski dengan perolehan pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi, Negara Indonesia tidak terlepas dari permasalahan ketimpangan antar wilayah-wilayahnya yang terlihat pada perbedaan pendapatan

PDRB antar provinsi yang relatif berbeda yang tercermin dalam data PDRB yang dikelompokkan per pulau di bawah ini.

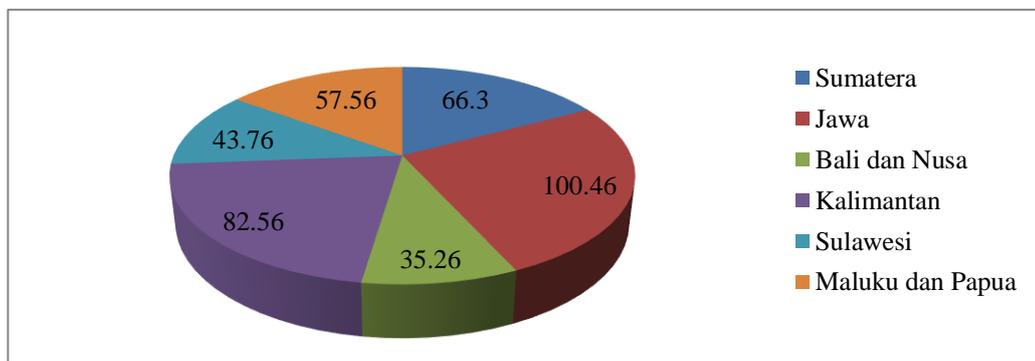


**Grafik 1.3 Kontribusi Antar Pulau Terhadap PDRB Nasional**

Jika melihat persentase kontribusi dari masing-masing pulau dengan menggunakan gambaran seperti pada grafik 1.3 diatas, dapat dilihat perbedaan yang sangat besar dari kontribusi masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Besarnya perbedaan kontribusi PDRB antara pulau satu dengan pulau lainnya menggambarkan asumsi bahwa terdapat adanya ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Indonesia. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 59% yang artinya Pulau Jawa memegang kendali penuh atas pendapatan PDRB Nasional. Sedangkan pulau-pulau lain memberikan kontribusi dari 2,2% hingga 21,6% saja. Dengan keadaan data seperti ini jelas terdapat adanya ketimpangan pendapatan dari masing-masing wilayah dalam hal ini yaitu pulau dengan mempertimbangkan nilai dari PDRB atas dasar harga berlaku dari masing-masing provinsi.

Adapun jika dilihat dari data PDRB Perkapita menurut Provinsi yang terbagi dalam beberapa pulau di Indonesia tahun 2019 seperti pada grafik 1.2 dibawah juga sama menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan perkapita antar

provinsi. Namun besaran tingkat ketimpangan yang ditunjukkan tidak sebesar seperti pada data PDRB atas dasar harga berlaku sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan PDRB masing-masing provinsi didukung oleh banyaknya jumlah penduduk yang ada pada masing-masing daerah yang tentunya didukung dengan tingkat produktivitas yang dimiliki. Untuk gambaran lebih jelas mengenai besaran ketimpangan pendapatan PDRB Perkapita antar pulau di Indonesia dapat dilihat pada grafik 1.4 dibawah.



**Grafik 1.4 Kesenjangan Total PDRB Perkapita Tahun 2019**

Kesenjangan pendapatan PDRB Perkapita seperti pada Grafik 1.4 diatas tentunya bukanlah sesuatu hal yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Tentunya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan yang merata lah yang menjadi dambaan setiap pemerintah maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Dan untuk mencapai semua itu tentunya harus diketahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti ingin mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Analisis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Produktivitas tenaga kerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Indonesia”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah yang dapat ditarik yaitu mengenai masalah ketimpangan wilayah yang terjadi antar provinsi di Indonesia terkhusus di tahun 2019 dengan menganalisis beberapa variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah tersebut diantaranya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja, dan Juga mengukur besar ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia yang terjadi di tahun 2019.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berapa besar tingkat ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia tahun 2019?
- 2) Bagaimana pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan produktivitas tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia tahun 2019.
- 2) Mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Indonesia.
  - b) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga referensi yang berguna untuk pengembangan penelitian mengenai Ketimpangan Wilayah.
2. Manfaat praktis
  - a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang sejenis dan dapat pula sebagai bahan acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.
  - b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat atau daerah dalam melaksanakan program perencanaan pembangunan daerah kedepan.